

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Wilayah

2.1.1.1 Keadaan Geografis

Secara geografis Kota Semarang terletak pada 6°50'-7°50' Lintang Selatan dan garis 109°35'-110°50' Bujur Timur. Batas wilayah selatan kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Batas sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, Batas sebelah dengan Demak dan batas wilayah bagian utara berbatasan dengan Laut Utara dengan garis pantai yang mencapai 1,6Km. Ketinggian Kota Semarang antara 0,75MDPL-348MDPL.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Perkecamatan Kota Semarang Tahun

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase
1	Mijen	55,75 ²	15.5%
2	Gunungpati	54,11 ²	14.4%
3	Banyumanik	25,67 ²	7%
4	Gajahmungkur	9,07 ² 0	2.4%
5	Semarang Selatan	5,93 ²	1.5%
6	Candisari	6,54 ²	1.75%

7	Tembalang	44,20 ²	11.8%
8	Pedurungan	20,72 ²	5.5%
9	Genuk	27,39 ²	7.3%
10	Gayamsari	6,81 ²	1.82%
11	Semarang Timur	7,70 ²	2.2%
12	Semarang Utara	10,97 ²	2.9%
13	Semarang Tengah	6,14 ²	1.6%
14	Semarang Barat	21,74 ²	5.8%
15	Tugu	31,78 ²	8.5%
16	Ngalian	37,99 ²	10.1
Total		373,70 ²	100%

Sumber: BPS Kota Semarang

Kota Semarang dengan Luas wilayah 373,70KM². Secara administratif Kota Semarang terbagi dalam 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Terdapat 2 kecamatan yang memiliki wilayah teluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas 57,55KM² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11². Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah kecamatan Semarang Selatan dengan luas 5,93KM² dan di susul oleh wilayah Semarang Tengah dengan 6,14KM²

2.1.1.2 Keadaan Demografis

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki angka demografi tertinggi, hal ini dikarenakan Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan wilayah Kota Semarang merupakan wilayah yang strategis di bidang prekonomian yang membuat banyak orang tertarik datang dan tinggal di Kota Semarang. Penduduk Kota Semarang terdiri dari berbagai suku mulai suku Jawa,

Tionghoa, Arap,dll yang tinggal saling berdampingan dan dapati hidup harmonis. Berdasar data Badan Pusat Statistika total penduduk di Kota Semarang pada tahun 2015 mencapai 1.595.187 jiwa yang terbagi penduduk laki-laki 789.886 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 802.301 Jiwa yang terbagi dalam 16 Kecamatan seperti pada table berikut

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Persentase Laki-Laki	Persentase Perempuan
1	Mijen	30.942	30.463	51%	49%
2	Gunungpati	39.403	39.238	51%	49%
3	Banyumanik	65.158	67.350	49%	51%
4	Gajahmungkur	31.909	31.798	51%	49%
5	Semarang Selatan	39.323	40.297	49%	51%
6	Candisari	39.333	39.925	49%	51%
7	Tembalang	79.440	77.428	52%	48%
8	Pedurungan	89.005	91.277	49%	51%
9	Genuk	49.086	48.459	51%	49%
10	Gayamsari	37.463	36.715	51%	49%
11	Semarang Timur	38.072	39.259	49%	51%
12	Semarang Utara	62.041	65.711	49%	51%
13	Semarang Tengah	34.333	35.846	49%	51%
14	Semarang Barat	78.650	79.481	49%	51%
15	Tugu	15.942	16.012	49%	51%
16	Ngalian	62.785	63.042	49%	51%
Total		792.886	802.301	49%	51%
Total		1.595.187		49%	51%

Sumber: BPS Kota Semarang

2.1.1.3 Agama

Agama merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mempercayai adanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tidak hanya secara individu, agama bisa digunakan masyarakat untuk menuntun kehidupan sosial kemasyarakatannya. Dengan adanya agama dapat mengubah kehidupan kelompok masyarakat menjadi kehidupan yang teratur. Dengan fungsi ini seharusnya agama terus-menerus menjadi dasar nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mengarungi kehidupannya sehari-hari. Komposisi penduduk di Kota Semarang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat bervariasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang di anutnya seperti pada data berikut

Table 2.3

Agama dan kepercayaan masyarakat Kota Semarang 2015

NO	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1 335 585	83%
2	Katholik	116 747	7.3%
3	Kristen	111.712	7%
4	Budha	18.402	1.15%
5	Hindu	10.525	0.65%
6	Lainya	2.952	0.9%
	Total	1.595.267	

Sumber: BPS Kota Semarang

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. IPM sendiri terdiri dari beberapa variable seperti Pendidikan, Kesehatan dan prekonomian, berdasarkan data BPS Kota Semarang dari tahun-ketahun IPM Kota Semarang selalu terjadi peningkatan dan pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia sudah mencapai nilai 80.02

2.1.1.5 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negar. Dengan evaluasi tersebut pemerintah dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi para penduduknya. Apabila ditemukan Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa bayi-bayi telah terjamin kesehatan dan kemiskinan sudah diatasi lebih baik. Berdasarkan data BPS Angka Harapan Hidup di Kota Semarang sebesar 77.21

2.1.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Kebutuhan pangan dan Non Pangan) seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan data BPS Kemiskinan di Kota Semarang dari tahun ketahun mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 angka kemiskinan hanya menyetuh angka 80.860

2.2 Konstelasi Politik

Pasca runtuhnya rezim orde baru yang di tandai dengan turunya Presiden Soeharo pada tahun 1998 membawa angin segar pada kondisi politik nasional. Dengan adanya Reformasi menandai di mulainya erabaru dalam berpolitik yang di harapkan dapat membawa kehidupan politik Indonesia lebih bebas, partisipatif dan adil.

Pada pemilu awal reformasi diikuti oleh 48 Partai plitik jumlah ini meningkat sangat drastis dibanding dengan pemilu sebelumnya di tahun 1997 yang hanya diikuti 3 partai politik saja yaitu Partai Golkar, PPP dan PDI. Pada pemilu 1999 ini PDIP keluar sebagai pemenang di pemilu legislaif Kota Semarang mengalahkan dominasi Partai Golkar. Dari beberapa Partai Politik peserta Pemilu terdapat banyak partai yang tidak dapat menempatkan calonya di kursi legislatif Kota Semarang.

Tabel 2.4

Prolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Semarang 1999

No	Partai	Jumlah Suara	Persentase
1	PDIP	386.220	54%
2	Golkar	99.946	14%
3	PAN	85.621	12%
4	PKB	82.059	11.5%
5	PPP	37.165	5%
6	PBB	10.582	1.5%
7	PKP	10.053	1%
Total		711.646	

Sumber: KPU Kota Semarang

Pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, pada Pemilu ini muncul satu partai baru yang secara tidak di duga dapat memberikan persaingan yang ketat dengan Partai-Partai besar pada pemilu sebelumnya, yaitu partai Demokrat. Partai yang didirikan pada tahun 2001 ini oleh Susilo Bambang Yudhoyono dapat merebut simpati banyak masyarakat utamanya masyarakat Semarang. Walau terjadi penurunan prolehan suara dari Pemilu sebelumnya hasil dari Pemilu 2004 masih menempatkan PDIP sebagai Partai pemenang Pemilu dan di ikuti Partai Demokrat di urutan kedua.

Tabel 2.5

Prolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Semarang 2004

No	Partai	Jumlah Suara	Persentase
1	PDIP	208.264	29.5%
2	Demokrat	130.845	18.5%
3	Golkar	108.795	15.4%
4	PKB	66.337	9.3%
5	PKS	56.925	8%
6	PAN	53.772	7.6%

7	Partai Damai Sejahtera	43.182	6.3%
8	PPP	38.304	5.4%
Total		711.646	

Sumber: KPU Kota Semarang

Pada Pemilu 2009 diikuti oleh 28 Partai Politik, Pada Pemilu kali ini muncul juara baru yang berhasil mengalahkan dominasi PDIP pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, yakni partai Demokrat. Partai yang dalam Pemilu 2004 menduduki urutan kedua di Pemilu legislatif Kota Semarang dapat menarik simpati dan mendapat suara mayoritas masyarakat Semarang dengan mendapat 196.766 suara dan disusul oleh PDIP diposisi kedua dengan 115.172 suara

Tabel 2.6

Prolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Semarang 2009

No	Parantai Politik	Perolehan Suara	Persentase
1	Demokrat	196.766	33.5%
2	PDIP	115.172	19.5%
3	PKS	66.248	11.2%
4	Golkar	61.764	10%
5	PAN	48.978	8%
6	Gerindra	38.199	6.4%
7	PKB	25.063	4.2%
8	PPP	23.211	3.9%
9	Hanura	19.734	3.3%
Total		593.135	

Sumber: KPU Kota Semarang

Pada Pemilu 2014 diikuti oleh 12 Partai Politik jumlah ini adalah jumlah yang paling sedikit selama Pemilu pascareformasi. Pada pemilu kali ini kembali menempatkan PDIP sebagai perebut suara mayoritas yang pada Pemilu sebelumnya diduduki oleh Partai Demokrat

Tabel 2.7

Prolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Semarang 2014

No	Partai	Jumlah Suara	Persentase
1	PDIP	275.435	37%
2	Gerindra	89.540	12%
3	Demokrat	86.636	11.6%
4	PKS	57.812	7.7%
5	PKB	56.494	7.5%
6	Golkar	41.237	5.5%
7	PAN	36.375	4.8%
8	Nasdem	35.518	4.7%
9	Hanura	29.269	3.9%
10	PPP	26.660	3.5%
11	PKPI	5.611	1%
12	PBB	4.548	0.8%
Total		745.135	

Sumber: KPU Kota Semarang

1.2.1. Keterpilihan Perempuan di DPRD Kota Semarang

Afirmative action adalah suatu peraturan yang memaksa partai politik untuk lebih memberikan ruang pada perempuan demi terciptanya kesetaraan gender di bidang politik pada pemilu 2004 dengan mengeluarkan Undang-Undang No 12 tahun 2003. Undang-undang ini terus mengalami modifikasi di tiap pemilu selanjutnya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan, akan tetapi dalam pelaksanaan peraturan tersebut pada pemilu 2004-2014 belum dapat meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan baik di tingkat Nasional maupun local Seperti di DPRD Kota Semarang.

Tabel 2.8

Angka Keterpilihan calon legislatif perempuan 1999-2014

No	Periode Pemilu	Keterpilihan Laki-Laki	Keterpilihan Perempuan	Persentase Keterpilihan Laki-laki	Persentase Keterpilihan Perempuan
1	1999	42	3	93%	7%
2	2004	39	6	86%	14%
3	2009	47	6	88%	12%
4	2014	39	11	78%	22%

Sumber Humas DPRD Kota Semarang

1.2.2. Pemilih dalam Pemilu 2014 Kota Semarang

Pada pemilu 2014 setiap orang yang telah memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh undang-undang pemilu dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki hak untuk memilih. DPT Adalah daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri. Jumlah DPT dikota Semarang mencapai 1.121.824 jiwa yang terdiri dari 544.065 pemilih laki-laki dan 577.759 Pemilih perempuan yang tersebar dalam 16 kecamatan

Tabel 2.9

Jumlah Pemilih Pada Pemilu legislatif 2014 Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Persentase Laki-laki	Persentase Perempuan
1	Semarang Tengah	23.253	26.678	47%	53%
2	Semarang Utara	42.356	45.475	49%	53%
3	Semarang Timur	26.933	25.579	47%	51%
4	Gayamsari	24.490	25.653	49%	51%
5	Genuk	34.062	34.364	49%	51%
6	Pedurungan	61.489	64.233	49%	51%
7	Semarang Selatan	24.199	26.933	49%	51%
8	Candisari	27.138	29.727	48%	52%
9	Gajah Mungkur	19.898	21.670	47%	53%
10	Tembalang	53.865	56.774	49%	51%
11	Banyu Manik	44.084	48.032	47%	53%

12	Gunung Pati	29.430	31.195	48%	52%
13	Semarang Barat	54.091	57.752	48%	52%
14	Mijen	21.103	21.762	49%	51%
15	Ngalian	46.216	46.816	49%	51%
16	Tugu	11.098	11.517	49%	51%
Total		544.065	577.759	48.5%	51.5%
Total		1.121.824			

Sumber KPU Kota Semarang

2.3 Partai PDIP

2.3.1 Sejarah Umum PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang biasa di kenal dengan PDIP pada awalnya bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI sendiri merupakan gabungan dari lima partai politik yaitu: Panrtai Nasional Indonesia (PNI), Partai Keristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba). Penggabungan partai ini di gagas oleh Presiden Soeharto pad 7 Januari 1970 dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.¹

Pada awal terbentuknya DPP diiringi terbentuknya kepengurusan Cabang (kepengurusan tingkat kabupaten) sebanyak 154 Cabang. Tahun 1974 kepengurusan

¹ www.PDIPerjuangan.id

Cabang bertambah 77 Cabang, tahun 1975 bertambah 20 Cabang, tahun 1976 bertambah 6 Cabang. Selama berdirinya PDI terdapat banyak konflik internal yang berkepanjangan yaitu sejak kongres PDI yang pertama di tahun 1979 hingga kongres ke empat di tahun 1993.

Setelah gagalnya Kongres ke empat PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh 70 DPC PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum. Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Dengan banyaknya dukungan yang di raih Megawati Untuk menjadi Ketua Umum muncul kekhawatiran Pemerintah. Pemerintah tidak ingin Megawati tampil dan untuk menghadangnya muncul larangan untuk mendukung Megawati pada acara Rapimda PDI Sumatera Utara yang diadakan dalam rangka persiapan KLB PDI. Walau terdapat laarangan oleh pemerintah tetapi sebagian besar peserta KLB teteap menginginkan Megawati menjadi Ketua Umum PDI hingga akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto.

Untuk menyelesaikan konflik internal beberapa hari setelah KLB dilaksanakanlah Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dalam Munas ini dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998.

Berakhirnya munas malah melahirkan masalah baru yaitu . Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle dengan di lakukanya kongres, pemerintah tidak melarang di adakanya kongres malah pemerintah cenderung mendukung

diadakanya kongres. Tetapi Ketua Umum DPP PDI, Megawati Soekarnoputri menolak tegas diselenggarakannya Kongres tersebut.

Meskipun masa pendukung Megawati menolak keras Kongres Medan, namun Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Pemerintah mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tahun 1997.

Pascakongres Megawati beserta jajaran pengurusnya masih tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan dibawah pantauan Pemerintah. Pada Pemilu 1997 Megawati melalui Pesan Hariannya menyatakan bahwa PDI dibawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. Pemilu 1997 diikuti oleh PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan hasil Pemilu menunjukkan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati karena hasil Pemilu PDI merosot tajam dan hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.

Pascareformasi PDI menyelenggarakan Kongres V PDI di Denpasar Bali. Kongres ini yang dinilai paling demokratis. Dan kongres ini juga dikenal sebagai “Kongres Rakyat”. Pada kongres Ke-V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Dalam Kongres tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengembangkan strategi-strategi organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukan di dalam AD-ART PDI.

Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke – 4.

2.3.2 Visi dan Misi PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945. Dalam kepengurusan kepartaiannya tentu tidak akan bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia seperti yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea empat. Untuk ikut

berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa PDIP memiliki Visi dan Misi berdasarkan pada amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan:

- a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

MISI PDI PERJUANGAN

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

1. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik Partai.
2. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
3. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan Rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
4. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi Rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
5. Memperjuangkan kepentingan Rakyat dibidang ekonomi, social dan budaya secara demokratis.
6. Berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
7. Membentuk dan membangun karakter bangsa.
8. Mendidik dan mencerdaskan Rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
9. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga Negara.
10. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

11. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
12. Mempersiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan public melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dan
13. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan Negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2.2.3 Kepengurusan DPP PDI Perjuangan

Sama seperti organisasi pada umumnya, Partai politik juga memiliki struktur organisasi yang bersifat hirarkis untuk memudahkan pembagian tugas dan Koordinasi. PDIP memiliki 3 Dewan pimpinan yang aktif yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat Nasional/ Pusat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang di Tingkat Kabupaten/Kota. DPP PDIP sendiri beralamat di Pangeran Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat. Di tingkat DPP sendiri kepengurusan PDIP sebagai berikut:

Tabel 2.10

Kepengurusan DPP PDIP

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Umum	Megawati Soekarnoputri.
2	Ketua Bidang Kehormatan Partai	Komarudin Watubun.
3	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Bambang Dwi Hartono.
4	Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	Idam Samawi.
5	Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	Djarot Syaiful Hidayat.
6	Ketua Bidang Politik dan Keamanan	Puan Maharani
7	Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan	Trimedya Pandjaitan.
8	Ketua Bidang Perekonomian	Hendrawan Supratikno.
9	Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Muhammad Prakosa.
10	Ketua Bid Kemaritiman	Rohmin Dahuri.
11	Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Andreas Hugo Pareira.
12	Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana	Ribka Tjiptaning.
13	Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan	Mindo Sianipar.
14	Ketua Bidang Kesehatan dan Anak	Sri Rahayu.
15	Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	I Made Urip.
16	Ketua Bidang Koperasi dan UMKM	Nusirwan Sujono
17	Ketua Bid Pariwisata	Sarwo Budi Wiranti S.
18	Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	Sukur Nababan.
19	Ketua Bid Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME	Hamka Haq.
20	Ketua Bidang Ekonomi Kreatif	Prananda Prabowo.
21	Sekretaris Jenderal (Sekjen)	Hasto Kristiyanto.
22	Wakil Sekjen Bidang Internal	Utut Adianto.
23	Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan	Erico Sotarduga.
24	Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan	Ahmad Basarah.
25	Bendahara Umum	Olly Dondo Kambey.
26	Wakil Bendahara Umum Bidang Internal	Rudiyanto Chen.

Sumber: DPP PDIP

2.3.3. Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

Tabel 2.11

Kepengurusan PDI Perjuangan DPC Kota Semarang

No	Nama	Jabatan
1	H Hendrar Prihadi , SE. MM	Ketua
2	Ir. Lelly Purwandari	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
3	Supriyadi, S.	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
4	Meidina Kuswara, A.Md	Wakil Ketua Bidang Pengembangan SDM
5	Rahmulyo Adi Wibowo, SH	Wakil Ketua Bidang Hukum
6	R. Yuwanto	Wakil Ketua Bidang Organisasi
7	Fajar Rinawan, SH	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi
8	Sudaryanto	Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan
9	Daniel Toto Indiyono	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan
10	Nungki Sunandri, SE	Wakil Ketua Bidang HAM
11	Okke Maria Indiyanto	Wakil Ketua Bidang Kerakyatan
12	Novi Sukmawati	Wakil Ketua Bidang Sosial
13	Leni Dyah W	Wakil Ketua Bidang Advokasi
14	Fajar Adi Pamungkas	Wakil Ketua Bidang Politik
15	Kadarlusman, SE	Sekretaris
16	Sutiyono, SH	Wakil Sekretaris
17	HM Rukiyanto AB.SH	Bendahara
18	Hj Ida Irawati	Wakil Bendahara

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

Struktur kepengurusan PDI Perjuangan DPC Kota Semarang dipimpin oleh ketua yang bertanggungjawab atas keberhasilan, kinerja, dan program-program partai. Ketua DPC dibantu oleh ketua-ketua bidang, Sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara adapun tugas-tugas tiap pengurus sebagai berikut:

1. Wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan menyusun kebijakan strategis tentang pembangunan perempuan agar perempuan dapat lebih mandiri,

terampil dan dapat lebih bersaing dengan laki-laki. Serata perlindungan pada hak-hak perempuan.

2. Wakil Ketua bidang pemenangan pemilu bertugas menetapkan suatu strategi yang efektif dalam memenangkan pemilu dan memiliki fungsi koordinasi dalam hal pemenangan pemilu
3. Wakil ketua bidang pengembangan SDM bertugas menyusun suatu kebijakan yang strategis terkait social, riset, teknologi dan Pendidikan
4. Wakil Ketua Bidang Hukum mempunyai tugas menyusun kebijakan strategis tentang pembangunan hokum di tingkat nasional, proses legislasi dan perlindungan hak asasi manusia
5. Wakil Ketua Bidang Organisasi bertugas menyusun kebijakan terkait rekrutmen anggota partai, pendataan anggota, klasifikasi keanggotaan partai bidang organisasi juga memiliki tugas untuk menerapkan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan partai
6. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi bertugas melakukan kaderisasi bagi tiap anggotanya dengan menekankan materi-materi baik materi kebangsaan dan juga materi kepartaoan
7. Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengenmabgan kepada petani dan nelayan

8. Wakil Ketua Bidang Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menyusun konsep kebijakan dan program strategis partai untuk nantinya diperjuangkan menjadi suatu kebijakan pemerintah.
9. Wakil Ketua Bidang Perekonomian Memiliki tugas untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat dan berupaya memberikan solusi terkait masalah yang ada dengan berbagai cara
10. Wakil Ketua Bidang Kerakyatan memiliki tugas untuk menyusun program strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat, Wakil Ketua Bidang Kerakyatan juga menitik beratkan pada pembelaan dan memperjuangkan keinginan rakyat
11. Wakil Ketua Bidang Internal memiliki tugas untuk menyusun kebijakan dan program strategis partai di tingkat Kota yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penguatan partai
12. Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai memiliki tugas menjaga nama baik partai dan menegakan peraturan-peraturan partai
13. Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan memiliki tugas menyusun kebijakan strategis partai menangkut hubungan pemerintahan